

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memperbanyak atau memperjualbelikan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

SOSIALISASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI DESA KAMPUNG PINANG KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR

Zaili Rusli¹, Sujianto¹, Dadang Mashur¹, Zulkarnaini¹

¹Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau

Email: da2nk_mashur@yahoo.co.id

Abstrak

Pemanasan global memicu terjadinya perubahan iklim yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia di muka bumi, termasuk di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Perubahan iklim telah menyebabkan berubahnya pola hujan, naiknya muka air laut, terjadinya badai dan gelombang tinggi, serta dampak merugikan lainnya yang mengancam kehidupan masyarakat.

Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana terkait iklim seperti: (a) Kekeringan, banjir dan longsor, (b) Kegagalan panen, (c) Kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi dan (d) Wabah penyakit malaria dan demam berdarah.

Desa Kampung Pinang mempunyai potensi untuk dikembangkan / diberdayakan masyarakatnya melalui Program Kampung Iklim (PROKLIM) dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Untuk itu Desa Kampung Pinang dapat mengusulkan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam kerangka Program Kampung Iklim dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kapasitas dan sumber daya yang tersedia di lokasi setempat.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat dan Program Kampung Iklim

PENDAHULUAN

Menghadapi perubahan iklim, seluruh pihak termasuk masyarakat perlu melakukan tindakan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap dampak yang ditimbulkan serta mitigasi untuk mengurangi emisi (Gas Rumah Kaca) GRK. Dengan dilakukannya upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan masyarakat diharapkan akan meningkat sehingga risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalkan. Selain mengurangi emisi GRK, upaya mitigasi yang dilakukan dapat menekan biaya adaptasi, karena semakin besarnya konsentrasi GRK yang memicu perubahan iklim, akan memicu dampak perubahan iklim yang lebih besar, sehingga akan berdampak pada biaya pelaksanaan upaya adaptasi.

Dengan dilakukannya upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan masyarakat diharapkan akan meningkat sehingga risiko yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

mungkin terjadi dapat diminimalkan, antara lain dengan cara menyiapkan infrastruktur yang tahan terhadap bencana iklim, memperkuat kemampuan ekonomi, kapasitas sosial, tingkat pendidikan, serta menerapkan teknologi adaptasi perubahan iklim yang sesuai dengan kondisi lokal. Selain melakukan upaya adaptasi, masyarakat perlu terus didorong untuk melakukan tindakan mitigasi yang akan memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi GRK secara global.

Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat terintegrasi dengan kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan masyarakat di tingkat lokal dengan memperhatikan faktor risiko iklim dan dampak perubahan iklim yang mungkin terjadi. Seluruh upaya yang telah dilaksanakan masyarakat, perlu diinventarisasi dan terdata dengan baik agar dapat diukur kontribusinya terhadap pencapaian target pengurangan emisi GRK dan peningkatan kapasitas adaptasi nasional.

Pendataan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat dilaksanakan melalui pendekatan yang bersifat *bottom-up*, yaitu dengan mendorong berbagai pihak mengumpulkan informasi mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat dan dapat memberikan manfaat nyata terhadap upaya penanganan perubahan iklim. Pendataan dan pengukuran manfaat tersebut dibatasi pada luasan tertentu dengan menggunakan terminologi "Kampung Iklim".

Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK. Melalui pelaksanaan ProKlim, Pemerintah memberikan penghargaan terhadap masyarakat di lokasi tertentu yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Pelaksanaan ProKlim mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim. ProKlim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah minimal setingkat Dusun/Dukuh/RW dan maksimal setingkat Desa/Kelurahan atau yang dipersamakan dengan itu.

Program Kampung Iklim dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya sehingga seluruh pihak terdorong untuk melaksanakan aksi nyata yang dapat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK.

Tujuan Khusus Program Kampung Iklim adalah:

- a. Mengidentifikasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta potensi pengembangannya di tingkat lokal.
- b. Memberikan pengakuan terhadap aksi lokal yang telah dilakukan masyarakat untuk mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- c. Mendorong penyebaran kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah berhasil dilaksanakan pada lokasi tertentu untuk dapat diterapkan di daerah lain sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.

Manfaat Program Kampung Iklim meliputi:

- a. meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim;
- b. terukurnya potensi dan kontribusi pengurangan emisi GRK suatu lokasi terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK nasional
- c. tersedianya data kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta potensi pengembangannya di tingkat lokal yang dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program terkait perubahan iklim;
- d. tersosialisasinya kesadaran dan gaya hidup rendah karbon;
- e. meningkatnya kemampuan masyarakat di tingkat lokal untuk mengadopsi teknologi rendah karbon.

Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi ProKlim dapat berupa:

- a. pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor;
- b. peningkatan ketahanan pangan;
- c. pengendalian penyakit terkait iklim;
- d. penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi.
- e. pengelolaan sampah, limbah padat dan cair;
- f. pengolahan dan pemanfaatan air limbah;
- g. penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi;



- h. budidaya pertanian;
- i. peningkatan tutupan vegetasi; dan
- j. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

KAJIAN LITERATUR

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangunan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki oleh seseorang semakin baik pula kemampuan berpartisipasi (Hikmat, Hary, 2004: 4).

Seperti telah disebutkan sebelumnya, pengertian pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata "*empowerment*," yaitu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Wahyono, *et al.* (2001:8), menyatakan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*self-reliant communities*) sebagai suatu sistem yang mengorganisasikan diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat seperti itu diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai objek tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people-centered development*) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumberdaya lokal (*community-based resources management*) sebagai mekanisme perencanaan *people-centered development* yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (*social learning*) dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya (*empowerment*).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people centred, participatory,*



empowering, and sustainable" (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki '*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*'. (Ginanjar K., Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan : Teori, Kebijakan, dan Penerapan", 1997:55).

Prinsip pemberdayaan ditekankan akan adanya pola kesinambungan antara program yang dijalankan dengan hasil yang didapat. Nantinya akan terlihat perubahan dalam wujud indikator-indikator yang bisa dinilai dan dievaluasi untuk pengembangan pemberdayaan selanjutnya. Pola pemetaan dalam kebutuhan masyarakat diperlukan sebagai acuan untuk tindak apa yang bisa dilakukan dalam proses pemberdayaan ini. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

a. Proses Pemberdayaan Masyarakat yang Terarah

Ini berhubungan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang harus dilakukan dengan program yang simultan dan jelas antara input, pemberdayaan, dan output. Masyarakat menjadi bagian dari pemberdayaan dengan pelibatan langsung untuk ikut serta memikirkan bagaimana kelanjutan dan hasil yang diharapkan. Masyarakat bukan sebagai objek semata, mereka adalah bagian dari integrasi yang harus mendapatkan dampak langsung dari program pemberdayaan. Ini menuntut adanya pola terarah dengan program-program dan rumusan pelaksanaan di lapangan yang mengarah pada aspek kebutuhan masyarakat itu sendiri.

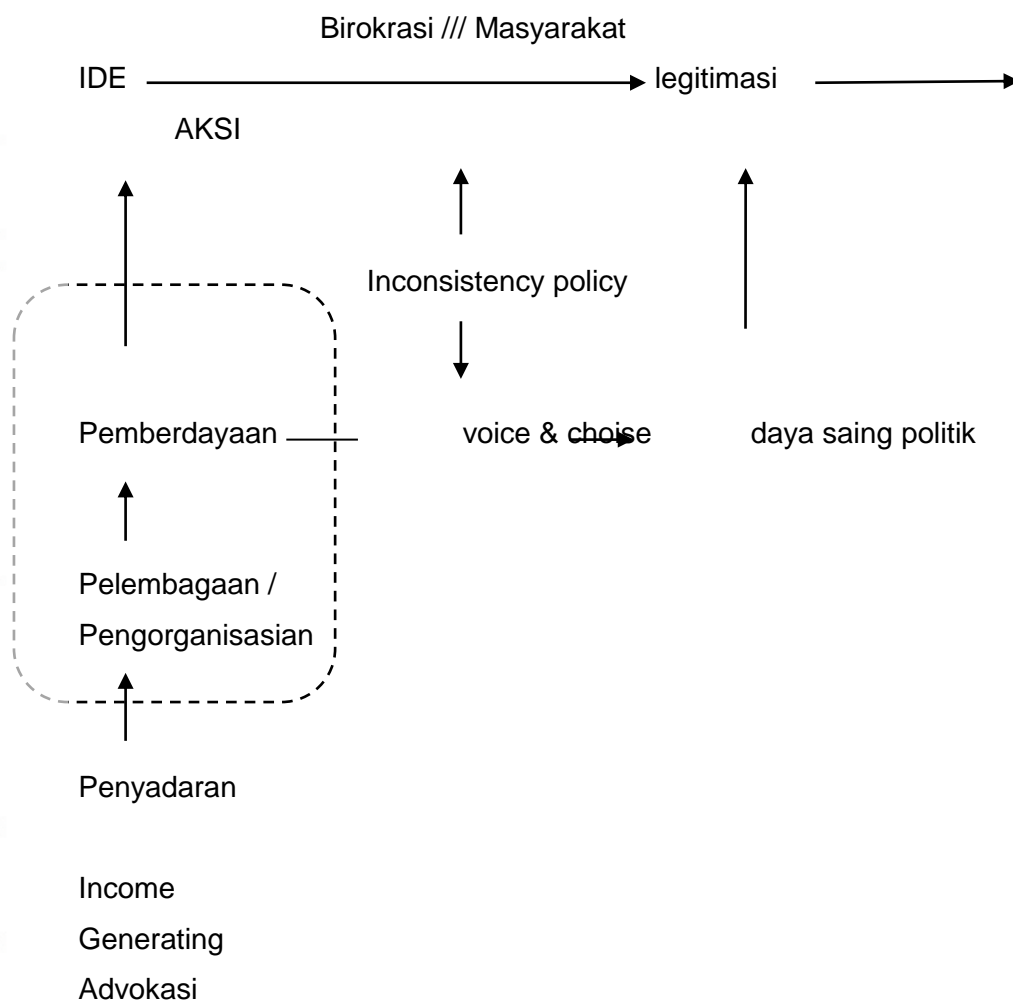
Adanya pelibatan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan pemberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

melaksanakan, mengelola, dan bertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Dengan demikian, ada proses pembelajaran manajemen dari masyarakat sendiri. Nantinya akan didapatkan simpul-simpul jaringan pemberdayaan yang timbul dari faktor internal.



Gambar 1. Proses Pemberdayaan Masyarakat

b. Adanya Konsep Pendekatan Kelompok dalam Pemberdayaan

Masyarakat adalah bagian dari struktur paguyuban yang notabene tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini, kerja sama di antara mereka amat diperlukan demi membangun konsolidasi baik di dalam masyarakat itu sendiri maupun para pemangku kepentingan (stakeholder). Konsep pendekatan kelompok sangat diperlukan agar masyarakat dapat saling berkolaborasi dalam upaya memahami dan menjalani. Selain itu, itu kemitraan usaha

antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus dibina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan.

Dalam upaya ini diperlukan perencanaan berjangka, serta pengerahan sumber daya yang tersedia dan pengembangan potensi yang ada secara nasional, yang mencakup seluruh masyarakat. Selanjutnya, perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga sosial dan kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh dan individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk membantu.

Perubahan yang diharapkan juga tidak selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaan dalam langkah yang sama. Kemajuan dapat dicapai secara bertahap, langkah demi langkah, mungkin kemajuan-kemajuan kecil, juga tidak selalu merata. Pada satu sektor dengan sektor lainnya dapat berbeda percepatannya, demikian pula antara satu wilayah dengan wilayah lain, atau suatu kondisi dengan kondisi lainnya. Dalam pendekatan ini, maka desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan teramat penting. Tingkat pengambilan keputusan haruslah didekatkan sedekat mungkin kepada masyarakat.

Ciri mendasar yang membedakan pendekatan alternatif ini adalah penekanannya terhadap lokalitas, baik dalam pengertian kelembagaan, komunitas, lingkungan, maupun kultur. Implikasi kebijakan pendekatan ini adalah penekanan pada *transformative and transactive planning, bottom up, community empowerment*, dan *participative*, semuanya ini terkenal dengan Pembangunan Komunitas (*Community Development*).

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. Perubahan struktural yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati. Begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah yang menghasilkan.

Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro. Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai pangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity*



building) melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian, proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Terdapat lima kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat:

1. **Motivasi.** Anggota masyarakat dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Masyarakat perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.
2. **Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan.** Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat untuk menciptakan matapencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.
3. **Manajemen diri.** Kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.
4. **Mobilisasi sumber.** Merupakan sebuah metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari



pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang, jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

5. **Pembangunan dan pengembangan jaringan.** Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

METODE PENERAPAN

Metode penerapan Sosialisasi Program Kampung Iklim Di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

1. Mempersiapkan, mengumpulkan dan menganalisa berkas/dokumen yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan.
 2. Mengadakan pertemuan sesama tim FGD (Forum Discussion Group) untuk mendiskusikan dokumen-dokumen yang diperoleh.
 3. Mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa guna mendapatkan izin sosialisasi dan penetapan jadwal sosialisasi.
 4. Mengadakan sosialisasi kepada RT/RW, LSM dan dunia usaha.
- Teknik Penyelesaian Masalah**
1. Mengidentifikasi dan memahami tentang kondisi-kondisi yang ada (Das Sein)
Berupaya mengidentifikasi dan memahami tentang kondisi-kondisi yang ada pada lokasi pengabdian tersebut secara keseluruhan. Aturan dan pedoman komponen-komponen dan faktor-faktor yang sesuai dengan model, serta menganalisa permasalahan masyarakat desa.
 2. Mengidentifikasi tentang kondisi yang diinginkan (Das Sollen)



Berisi berbagai faktor yang mungkin perlu perubahan dan perkembangannya dengan catatan perubahan yang diinginkan itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi yang diinginkan harus keadaan yang mungkin dapat dicapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Desa Kampung Pinang merupakan desa yang terluas di kecamatan Perhentian Raja dengan luas sekitar 62,51 Km² atau 39% dari luas wilayah kecamatan Perhentian Raja. Kategori Desa Kampung Pinang ini sudah termasuk kedalam desa non tertinggal.

Jumlah penduduk Desa Kampung Pinang sebanyak 4.624 jiwa pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.488 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.136 jiwa. Rata-rata anggota rumah tangga pada tahun 2015 adalah 3 jiwa.

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2015, untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

Mayoritas penduduk di Desa Kampung Pinang bekerja disektor pertanian, yaitu perkebunan, serta perkebunan dan palawija. Jumlah keluarga pertanian sebanyak 538 KK dan jumlah keluarga buruh pertanian sebanyak 58 KK. Komoditi unggulannya adalah karet dan kelapa sawit.

Budaya berkaitan erat dengan kesejahteraan, keindahan, kebijaksanaan dan ketentraman. Oleh karena itu, budaya akan berkembang apabila masyarakat makmur dan sejahtera. Desa Kampung Pinang mayoritas dihuni oleh suku pribumi/melayu. Pada umumnya masyarakat sangat terbuka akan keberadaan suku lain, misalnya suku Jawa, Minang, Batak, dan lainnya sangat mudah untuk dijumpai. Perbedaan antara budaya dan suku penduduk tempatan dengan penduduk yang datang, tidak membuat perpecahan dimasyarakat, bahkan hal tersebut semakin menambah keragaman suku dan budaya di Desa Kampung Pinang.

Saat ini, mayoritas pemeluk agama adalah Agama Islam yang ditunjukkan dengan keberadaan tempat ibadah berupa Masjid sebanyak 4 buah,



Langgar/Surau sebanyak 12 buah, dan Gereja sebanyak 2 buah. Selain sarana ibadah, fasilitas olahraga juga tersebar di tiap-tiap RT/RW. Dari data yang terhimpun saat ini terdapat 2 Lapangan Sepak Bola, 2 Lapangan Bola Voli, 1 Lapangan Bulu Tangkis, 1 Lapangan Tennis Meja dan 1 Lapangan Bola Basket.

POTENSI PENGEMBANGAN (PEMBERDAYAAN) MASYARAKAT

Potensi pengembangan masyarakat di Desa kampung Pinang sangat memungkinkan untuk dikembangkan dengan baik mengingat Desa ini terletak tidak jauh dari pusat ibukota Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru dan bukan termasuk kedalam desa tertinggal.

Kemudian masyarakat desa ini bisa dikembangkan dengan baik mengingat fasilitas sarana dan prasarana yang sudah lengkap serta akses jalan dan transportasi yang sangat lancar sehingga memudahkan masyarakat Desa Kampung Pinang untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan pokok, ekonomi, pendidikan, kesehatan, transportasi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Masyarakat Desa Kampung Pinang juga diuntungkan dengan kondisi masyarakat yang tentram dan terbuka akan keberadaan suku dan agama lainnya sehingga memudahkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang di uni oleh mayoritas penduduk pribumi/melayu dengan pemeluk agama mayoritas islam.

Potensi pengembangan /pemberdayaan masyarakat Desa Kampung Pinang dalam menjaga lingkungan hidup juga di dukung dengan adanya wadah / lembaga-lembaga formal dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang peduli terhadap kondisi lingkungan di sekitar Desa Kampung Pinang seperti adanya Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Desa Kampung Pinang.

Upaya Adaptasi:

1. pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor
2. peningkatan ketahanan pangan
3. pengendalian penyakit terkait iklim

Upaya Mitigasi:

1. pengelolaan sampah, limbah padat dan cair;
2. pengolahan dan pemanfaatan air limbah;



3. penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi;
4. budidaya pertanian;
5. peningkatan tutupan vegetasi; dan
6. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

KESIMPULAN

Desa Kampung Pinang mempunyai potensi untuk dikembangkan / diberdayakan masyarakatnya melalui Program Kampung Iklim (PROKLIM) dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Untuk itu Desa Kampung Pinang dapat mengusulkan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam kerangka Program Kampung Iklim dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kapasitas dan sumber daya yang tersedia di lokasi setempat. Pemerintah Desa di rekomendasikan untuk mengusulkan lokasi desa untuk dijadikan percontohan dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) ke tingkat Kabupaten untuk diteruskan ke tingkat Kementerian dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim . Setelah mempertimbangkan hasil verifikasi dan penilaian teknis, rekomendasi lokasi Proklam diberikan oleh Tim Pengarah kepada Menteri. Tim Pengarah terdiri atas pejabat setingkat Eselon I dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan apabila diperlukan dapat melibatkan wakil Kementerian/Lembaga serta pakar yang mempunyai keahlian terkait pelaksanaan ProKlim. Menteri, berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengarah, menetapkan lokasi Proklam sebagai penerima sertifikat Proklam.

REFERENSI

1. Agus Surjono, dkk, 2008, *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*, Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA-UNIBRAW, Malang.
2. Rukminto, 2003, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
3. Mohammad Nazir, 1999, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Sondang P. Siagian, , 2003, *Administrasi Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Wugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Suwarsono, 2000, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.

Wotok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, 2015, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.

Widhi Hidayat dkk, 2003, *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Partisipatif*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta.

Wrihatnolo dan Nugroho, 2007, *Manajemen Pemberdayaan*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta